



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Letnan Amir Kusman No. 2 Telp. (0332) 421153  
**BONDOWOSO**

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 813/1264/430.10.1/2020

TENTANG

**PENGUMUMAN PEMBERKASAN  
USUL PENETAPAN NI PPPK TAHAP I TAHUN 2019  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26-30/V 249-2/99 tanggal 3 Desember 2020 perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 secara elektronik dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta PPPK yang berhak mengikuti pemberkasan NI PPPK adalah PPPK yang telah diangkat oleh Bupati Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 Keputusan Bupati Bondowoso tentang Penetapan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;
2. Pemberkasan penetapan NI PPPK tahun 2019 dilakukan secara elektronik (paperless) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital);
3. Dokumen kelengkapan usul penetapan NI PPPK yang harus disiapkan Calon PPPK untuk diunggah oleh instansi pada DOCUDigital yaitu:
  - a. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh ybs dan bermaterai 6000, yang berisi tentang :
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

- 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
  - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
4. Dokumen kelengkapan usul penetapan NI PPPK dimasukkan dalam 1 folder dan diberi nama dengan Nomer Peserta PPPK;
  5. Penamaan dan ukuran file dokumen kelengkapan usulan NI PPPK sebagai berikut :

No	Dokumen	Format File	Size
1	Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah		3 MB
2	Ijazah Pendidikan Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan	<i>IJZPEND_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB
3	Transkrip Nilai Asli	<i>IJZNILAI_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB
4	Surat Pernyataan Kesanggupan 5 poin	<i>SPCP_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Asli	<i>SKCK_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB
6	Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS	<i>SKETSEHAT_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB
7	Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Nakotika, Psikotropika, Prekuerson dasn Zat Adiktif lainnya	<i>SKETNAPZA_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB
8	Daftar Riwayat Hidup (DRH) Asli dan telah ditandatangani diatas materai	<i>DRH_Nomor Peserta.pdf</i>	3 MB

6. Pemberkasan dokumen kelengkapan usulan NI PPPK secara elektronik dimulai tanggal 10 s.d 17 Desember 2020;
7. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
8. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/ data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/tidak sah, peserta dinyatakan gugur;

9. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK/Pejabat baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan untuk diluluskan dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
10. Calon PPPK wajib untuk selalu memantau pengumuman dalam laman <https://bkd.bondowosokab.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
11. Rangkaian pemberkasan dan atau proses penetapan NI PPPK merupakan bagian dari Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso Formasi Tahun 2019, dimana ketidaksesuaian berkas dengan persyaratan yang ditentukan akan membatalkan pengangkatan;
12. Jika terdapat perbedaan data dokumen kependudukan, keabsahan/kebenaran mengacu pada data ijazah sesuai formasi dan dokumen lainnya menyesuaikan dengan data tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 7 Desember 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO**  
Selaku Ketua Panitia Pengadaan Calon PPPK  
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020



**SOEKARYO, SH.,MM**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19620717 199503 1 003